



Booklet

October 2018

PENANDAAN SPM BERBASIS SDGs DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH



<p>1 TANPA KEMISKINAN</p>	<p>2 TANPA KELAPARAN</p>	<p>3 KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA</p>	<p>4 PENDIDIKAN BERKUALITAS</p>	<p>5 KESETARAAN GENDER</p>	<p>6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK</p>
<p>7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</p>	<p>8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</p>	<p>9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR</p>	<p>10 BERKURANGNYA KESENJANGAN</p>	<p>11 KOTA DAN PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN</p>	<p>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB</p>
<p>13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p>	<p>14 EKOSISTEM LAUTAN</p>	<p>15 EKOSISTEM DARATAN</p>	<p>16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH</p>	<p>17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</p>	<p>TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</p>



1. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data pelayanan dasar dilakukan terhadap:

- jumlah dan identitas lengkap WN
- data penerima layanan menurut jenis layanan
- data barang dan data jasa menurut jenis layanan
- data sarana dan prasarana yang tersedia menurut jenis layanan
- data standar mutu layanan
- data standar belanja umum dan standar belanja keluaran
- data kemampuan keuangan daerah menurut urusan bidang pelayanan dasar
- data pemberian layanan mitra pemerintah menurut jenis layanan

2. PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penghitungan kebutuhan dilakukan dengan:

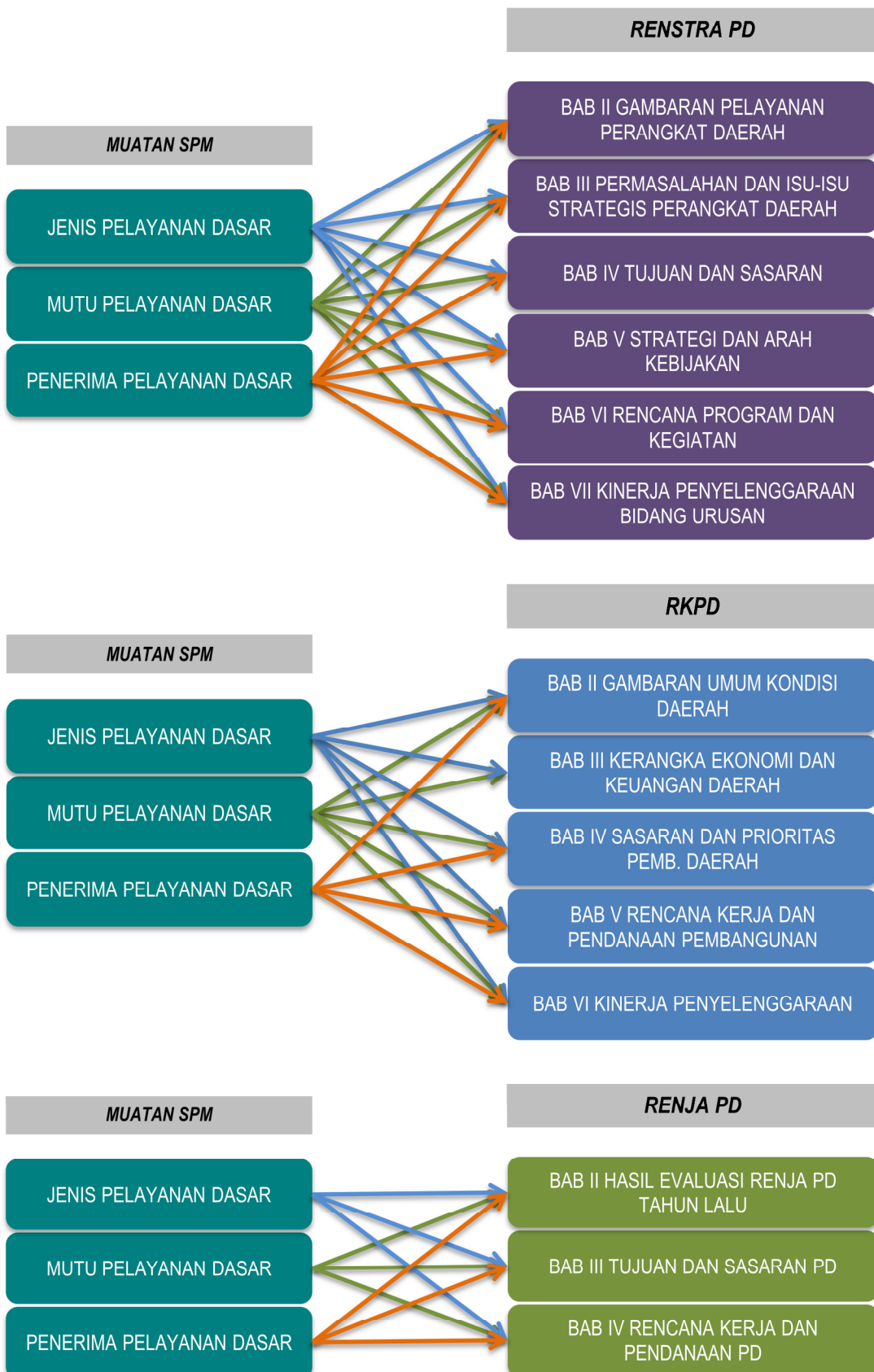
- menghitung selisih barang dan selisih jasa yang dibutuhkan dengan yang tersedia
- menghitung selisih sarpras utama dan pendukung yang dibutuhkan dan yang tersedia
- menghitung penerima pelayanan yang sudah dan belum mendapatkan pelayanan dasar
- menghitung jumlah pemberian pelayanan dasar yang dilakukan oleh mitra pemerintah menurut jenis layanan
- menghitung kebutuhan biaya untuk pemenuhan pelayanan dasar

3. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Penyusunan rencana dilakukan dengan:

- menentukan Target pemenuhan pelayanan dasar
- menentukan strategi pemenuhan pelayanan dasar, sehubungan dengan strategi pembiayaan (swakelola dan kerjasama) dan strategi pemenuhan (pembebasan biaya dan pemberian bantuan)
- Integrasi SPM dalam dokumen perencanaan, meliputi: RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja.



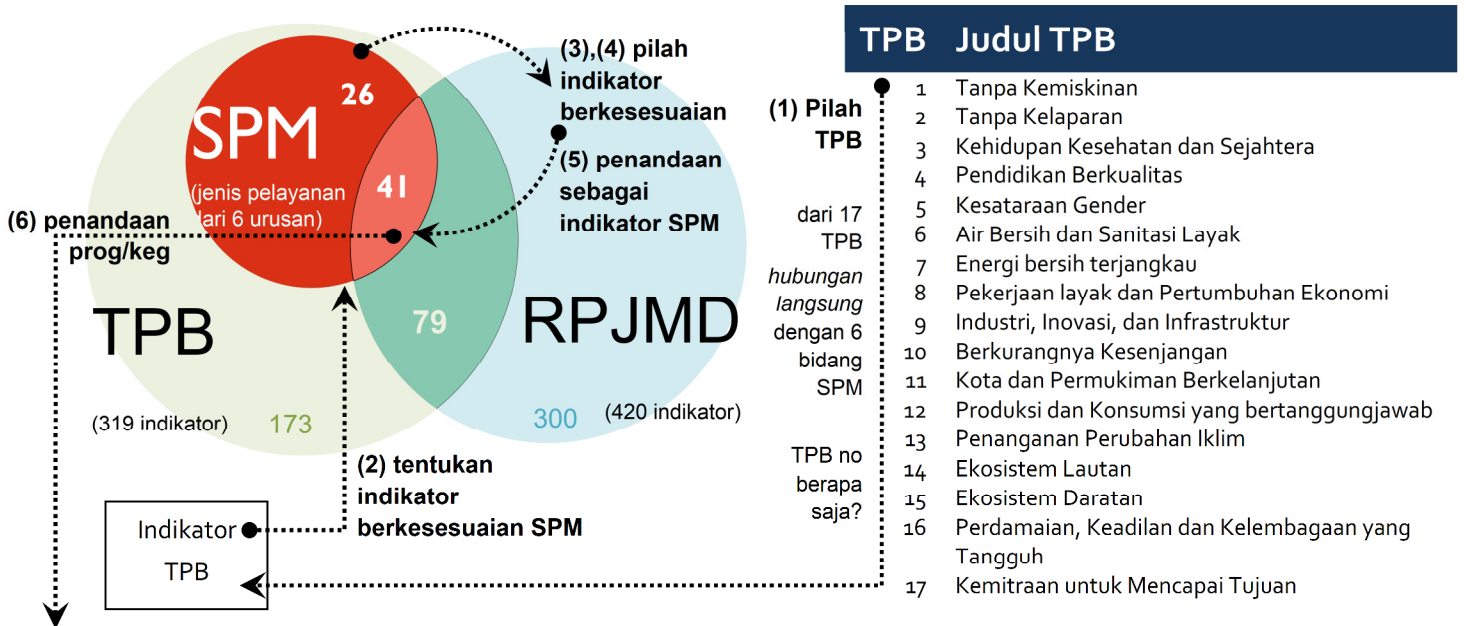




4. PENANDAAN SPM BERBASIS SDGs KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Penandaan SPM berbasis SDGs ke dalam dokumen perencanaan daerah dilakukan berikut:

- (1) Pilah TPB yang terkait dengan jenis layanan SPM
- (2) Tentukan indikator TPB yang sesuai dengan jenis layanan SPM
- (3) Pilah kesesuaian antara indikator TPB dengan indikator kinerja Urusan pemerintah
- (4) Pilah kesesuaian antara indikator TPB dengan kewenangan antar jenjang pemerintahan
- (5) Hasil pemilahan pada poin (3) dan (4) ditandai sebagai indikator SPM dalam dokumen perencanaan daerah
- (6) Tandai program dan kegiatan yang menggunakan indikator SPM hasil dari poin (5).



TPB	Judul TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
3	Kehidupan Kesehatan dan Sejahtera	Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4	Pendidikan Berkualitas	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Target TPB	TARGET/SASARAN GLOBAL
31	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
32	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000

Indikator TPB	TARGET/SASARAN GLOBAL	Indikator RPJMD	Target PPres 59/2017	Indikator Kinerja (PMDn86/2017)	Jenis Urusan /Kewenangan	SPM
311*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup (Permendagri 86/TPB)	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	KES-KabKota	SPM
312*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan/atau oleh tenaga kesehatan terlatih (Penyesuaian Permendagri 86/Lokalisasi TPB)	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KES-KabKota	SPM
312(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	(sudah diwakili oleh Indikator 3.1.2. *)	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KES-KabKota	SPM
321*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (Permendagri 86/Lokalisasi TPB)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	KES-KabKota	SPM

SELANJUTNYA lihat tabel pada halaman selanjutnya.

BIDANG PENDIDIKAN

Indikator TPB	TARGET/SASARAN GLOBAL	Indikator RPJMD	Target PPres 59/2017	Indikator Kinerja (PMDn86/2017)	Jenis Urusan /Kewenang	SPM	SPM-La
141(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	(sudah diwakili oleh Indikator 4.1.1.(d))	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	DIK-KabKota		
141(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	(sudah diwakili oleh Indikator 4.1.1.(e))	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	DIK-KabKota		
141(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	(sudah diwakili oleh Indikator 4.1.1.(f))	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 82,42%).	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	DIK-Provinsi		
151(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB= Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Cakupan pelayanan SPM pendidikan	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).		DIK-Provinsi	SPM	
411*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Cakupan SPM Pendidikan (SPM Pendidikan Pendidikan Dasar/Lokalisasi TPB)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		DIK-KabKota		
411(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	(Kewenangan Pusat)	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).		DIK-KabKota		
411(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	(Kewenangan Pusat)	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).		DIK-KabKota		
411(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	(Kewenangan Pusat)	Meningkatnya persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6% (2015:73,5%).		DIK-Provinsi		
411(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat (Permendagri 86)	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Angka partisipasi kasar	DIK-KabKota		
411(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat (Permendagri 86)	Meningkatnya APK SMP/MTs/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Angka partisipasi kasar	DIK-KabKota		
411(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) (Permendagri 86/Lokalisasi TPB).	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	Angka partisipasi kasar	DIK-Provinsi		
411(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Angka rata-rata lama sekolah	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Angka rata-rata lama sekolah	DIK-Provinsi		
422(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (Permendagri 86/Lokalisasi TPB).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Angka partisipasi kasar	DIK-KabKota		
431(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	(sudah diwakili oleh Indikator 4.1.1.(f))	Meningkatnya APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).	Angka partisipasi kasar	DIK-Provinsi	SPM-Lama	
451*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi	(sudah diwakili oleh Indikator 4.1.1.(d, e, f))	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	DIK-Daerah	SPM-Lama	
461(a)	Persentase Angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	DIK-KabKota		
461(b)	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	(sudah diwakili oleh Indikator 4.6.1.(a))	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	DIK-KabKota		

BIDANG PENDIDIKAN (LANJUTAN)

Indikator TPB	TARGET/SASARAN GLOBAL	Indikator RPJMD	Target PPres 59/2017	Indikator Kinerja (PMDn86/2017)	Jenis Urusan /Kewenang	SPM	SPM-La
4a1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Cakupan SPM Pendidikan (Mutu Pelayanan SPM Pendidikan)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		DIK-Daerah	SPM	
4c1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV (SPM/Permendagri 86)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	DIK-Daerah	SPM	
531(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK)SMA/SMK/MA/ sederajat	(sudah diwakili oleh Indikator 4.1.1.(f))	Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 75,4%).	Angka partisipasi kasar	DIK-Provinsi		SPM-Lama
						20	3 3

BIDANG KESEHATAN

Indikator TPB	TARGET/SASARAN GLOBAL	Indikator RPJMD	Target PPres 59/2017	Indikator Kinerja (PMDn86/2017)	Jenis Urusan /Kewenang	SPM	SPM-La
141(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	(sudah diwakili oleh Indikator 3.1.2.*)	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KES-KabKota		
141(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Sudah diwakili indikator 3.2.2b	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	KES-KabKota		
141(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Sudah diwakili indikator 3.7.1a	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	KES-KabKota		
151(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Cakupan pelayanan SPM untuk penanggulangan bencana (SPM Sosial dan/atau SPM Trantiblinmas)	Terpenuhnya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SOSIAL Trantiblinmas KES-Provinsi	SPM	
151(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Cakupan pelayanan SPM untuk penanggulangan bencana (SPM Sosial)	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SOSIAL KES-Provinsi	SPM	
211(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Angka prevalensi balita gizi kurang (permendagri 86)	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Prevalensi balita gizi kurang	KES-KabKota		
221*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(sudah diwakili oleh Indikator 2.1.1.(a))	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		KES-KabKota		
221(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	(sudah diwakili oleh Indikator 2.1.1.(a))	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).		KES-KabKota		
222*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(sudah diwakili oleh Indikator 2.1.1.(a))	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	KES-KabKota		
222(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Cakupan pelayanan SPM untuk ibu hamil (SPM Kesehatan)	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).		KES-KabKota		
222(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Cakupan pelayanan SPM untuk bayi baru lahir (SPM Kesehatan)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).		KES-KabKota		

BIDANG KESEHATAN (LANJUTAN)

Indikator TPB	TARGET/SASARAN GLOBAL	Indikator RPJMD	Target PPres 59/2017	Indikator Kinerja (PMDn86/2017)	Jenis Urusan /Kewenang	SPM	SPM-La
311*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup (Permendagri 86/TPB)	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	KES-KabKota	SPM	
312*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Cakupan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan/atau oleh tenaga kesehatan terlatih (Penyesuaian Permendagri 86/ Lokalisasi TPB)	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KES-KabKota	SPM	
312(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	(sudah diwakili oleh Indikator 3.1.2.*)	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KES-KabKota	SPM	
321*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup (Permendagri 86/Lokalisasi TPB)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	KES-KabKota	SPM	
322*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup (Permendagri 86)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	KES-KabKota	SPM	
322(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup (Permendagri 86)	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	KES-KabKota	SPM	
322(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (Permendagri 86)	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	KES-KabKota		SPM-Lama
331(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi (Permendagri 86)	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	KES-KabKota	SPM	
332(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) (Permendagri 86)	Menurunnya prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	KES-KabKota	SPM	
333*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Angka kejadian Malaria per 1000 orang (Permendagri 86)/Lokalisasi TPB	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Angka kejadian Malaria	KES-KabKota		SPM-Lama
333(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	(sudah diwakili oleh Indikator 3.3.3*)	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).		KES-KabKota		SPM-Lama
334(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak dipakai)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		KES-KabKota		SPM-Lama
335*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak dipakai)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)		KES-KabKota		SPM-Lama
335(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	(tidak dipakai)	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).		KES-Provinsi		
335(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	(tidak dipakai) / konfirmasi ke Subdit Kesehatan	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.		KES-KabKota		
341(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Prevalensi tekanan darah tinggi (Indikator TPB)	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).		KES-KabKota	SPM	
341(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	(tidak ada data)	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).		KES-KabKota		SPM-Lama
342(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Cakupan Pelayanan SPM Gangguan Jiwa Berat (SPM Kesehatan/Lokalisasi TPB)	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).		KES-KabKota	SPM	
372*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) (Permendagri 86/lokalisasi TPB)	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	KES-KabKota	SPM	



BIDANG SOSIAL

Indikator TPB	TARGET/SASARAN GLOBAL	Indikator RPJMD	Target PPres 59/2017	Indikator Kinerja (PMDn86/2017)	Jenis Urusan /Kewenang	SPM	SPM-La
121*	% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 8% (2015: 11,13%).	7. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	SOSIAL	SPM	
131(c)	% penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Cakupan SPM Sosial (SPM Sosial/Lokalisasi TPB)	Disesuaikan dengan SPM Sosial	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	SOSIAL	SPM	
131(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Permendagri 86/2017)	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	SOSIAL		
151(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Cakupan pelayanan SPM untuk penanggulangan bencana (SPM Sosial dan/atau SPM Trantiblinmas)	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SOSIAL Trantiblinmas	SPM	
151(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Cakupan pelayanan SPM untuk penanggulangan bencana (SPM Sosial)	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SOSIAL KES-Provinsi	SPM	
1a2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(Tidak termasuk Indikator, tapi masuk dalam analisis keuangan daerah (BAB III))	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%)	SOSIAL		
351(c)	Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.	(Kewenangan Pusat)	Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 210 (2015: 200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464).		SOSIAL		
351(d)	Jumlah lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu.	(Kewenangan Pusat)	Meningkatnya jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah dikembangkan/dibantu pada tahun 2019 menjadi 85 (2015: 75).		SOSIAL		